



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan : Firdaus H. Rais Singkawang 79123 Singkawang  
Laman : [bapenda.singkawangkota.go.id](http://bapenda.singkawangkota.go.id) Pos-el : [bapenda@singkawangkota.go.id](mailto:bapenda@singkawangkota.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 000.8.3.2/679/SET.01/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANANAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pelaksana Pelayanan Publik yang Profesional dan meningkatkan kepuasan penerima layanan, perlu menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang ditetapkan dengan suatu keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan pendapatan Daerah Kota Singkawang tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pada Badan pendapatan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pelaksana Pelayanan Publik Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pelaksana Pelayanan Publik Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);  
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
10. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

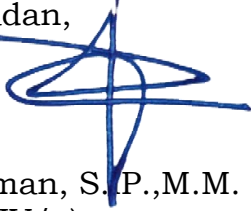
Menetapkan

- KESATU : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Pada Badan pendapatan Daerah Kota Singkawang.
- KEDUA : Kompensasi dapat diberikan kepada penerima layanan apabila:
- a. Penerima layanan tidak mendapat layanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
  - b. Pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- KETIGA : Bentuk Kompensasi yang dapat diberikan kepada penerima layanan adalah :
- a. Mendapatkan prioritas pelayanan sesuai ketentuan berlaku; dan
  - b. Mendapatkan fasilitas pengantaran berkas layanan yang telah selesai diproses ke rumah pengguna layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 10 Juli 2024  
Kepala Badan,



  
Farlinggoman, S.P.,M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198804102007011004